

SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA
PUSKESMAS DI KABUPATEN
PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN**

***THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARANCY
IMPLEMENTATION ON THE PERFORMANCE OF PUBLIC
HEALTH CENTERS IN PANGKAJENE AND KEPULAUAN
REGENCY***



NURHAZANAH ADINAH

C02 20 317

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
TAHUN 2025**

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA
PUSKESMAS DI KABUPATEN
PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN**

NURHAZANAH ADINAH

C02 20 317

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I

Jumardi SE., M.Si
NIP. 19800919 200604 1 022

Pembimbing II

Abdul Galib, SE., M.Si
NIP. 19890315 202203 1 005

Menyetujui
Koordinator Program Studi Akuntansi

Nuraeni M., S.Pd., M.Ak
NIP: 19831203 201903 2 006

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA
PUSKESMAS DI KABUPATEN
PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**NURHAZANAH ADINAH
C0 20 317**

Telah diuji dan diterima Panitia Ujian
Pada tanggal 8 Mei 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Jumardi, SE., M.Si	Ketua	1.
2. Abdul Galib, SE., M.Si	Sekretaris	2.
3. Taufik Hidayat B Tahawa, SE., M.Ak	Anggota	3.
4. Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak	Anggota	4.
5. Eni Novitasari, SE., M.Si	Anggota	5.

Telah disetujui Oleh

Pembimbing I

(Jumardi SE., M.Si)
NIP. 19800919 200604 1 022

Pembimbing II

(Abdul Galib, SE., M.Si)
NIP. 19890315 202203 1 005

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi



(Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB)
NIP. 19670325 199403 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurhazanah Adinah
NIM : C02 20 317
Jurusan/Program studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa skripsi yang berjudul

“Pengaruh Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Puskesmas di Kabupaten Pangkajene Kepulauan” adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan / ditulis / diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ditemukan hari ini ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur - unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Majene, 25 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Nurhazanah Adinah

ABSTRAK

Nurhazanah Adinah, 2025. **Skripsi berjudul** Pengaruh Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dibimbing oleh Jumardi, S.E., M.Si. dan Abdul Galib, S.E., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja Puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini melibatkan 48 sampel, dimana sampel tersebut yaitu pegawai/karyawan bagian keuangan di Puskesmas yang berada pada 16 titik Puskesmas di daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, aplikasi pengolah data yang digunakan adalah aplikasi SPSS. Penelitian ini menggunakan data primer. Sampel penelitian diberikan kuesioner untuk mengumpulkan data. Studi ini menggunakan analisis uji T, uji F, dan uji R². Pada penelitian ini hasil uji t menunjukkan 2,169 (X1) dan 2,447 (X2), dengan nilai T tabel = 1,680, dengan demikian Uji T X1 dan X2 > T tabel, serta nilai signifikannya lebih kecil dari 0.05 yaitu 0,035 (X1) dan 0,018 (X2) hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja suatu organisasi, begitu juga transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi, untuk Uji F menunjukkan 3,212, dengan nilai F hitung sebesar 22,694 dengan nilai signifikan sebesar $0,001 \leq 0,05$, maka hal tersebut menunjukkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada Puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan untuk Uji R² menunjukkkn nilai R *square* sebesar 0.502, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja organisasi sebesar 50,2%, sementara 49,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Kata Kunci : *Good corporate governance*, Akuntabilitas, Transparansi, *stakeholder* dan Kinerja organisasi.

ABSTRAC

NURHAZANAH ADINAH, *The Influence of Accountability and Transparency Implementation on the Performance of Public Health Centers in Pangkajene and Kepulauan Regency*, supervised by Jumardi, S.E., M.Si. and Abdul Galib, S.E., M.Si.

With regard to the performance of Community Health Centers in Pangkajene and Kepulauan Regency, this study seeks to ascertain the impact of implementing accountability and transparency. The SPSS software was utilized for data processing, and the study included 48 samples, all of whom were employees or financial personnel from Community Health Centers spread over 16 Community Health Center locations on the mainland of Pangkajene and Kepulauan Regency. This research makes use of primary data. To gather information, the research sample was given a questionnaire. T-test analysis, F-test, and R² test are used in this work. With a T table value of 1.680 and t-test findings of 2.169 (X1) and 2.447 (X2), the study's T Test X1 and X2 > T table, and the significant value, which is less than 0.05, is 0.035 (X1) and 0.018 (X2). This indicates that the performance of an organization is positively impacted by the application of accountability and that transparency also improves organizational performance. At the Health Center in Pangkajene and Kepulauan Regency, accountability and transparency have a simultaneous impact on organizational performance, as demonstrated by the F Test's 3.212, calculated F value of 22.694, and significant value of $0.001 \leq 0.05$. The R² Test's R square value of 0.502 indicates that accountability and transparency have a 50.2% influence on organizational performance, with 49.8% being influenced by variables not included in this study.

Keyword : Good Corporate governance, Accountability, Transparency, Stakeholder, and organizational performance

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja adalah derajat pencapaian yang dicapai oleh seorang individu atau kelompok dalam menyelesaikan tugas dalam jangka waktu tertentu. Mustahil untuk meningkatkan kinerja tanpa manajemen efisien yang dapat membantu upaya kelembagaan untuk melakukannya. Sasaran dari semua inisiatif manajemen kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja pada tingkat setinggi mungkin dalam setiap organisasi.

Kinerja, yang dapat diartikan sebagai derajat pencapaian hasil dari pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sebagai akibat dari pencapaian tugas oleh individu dalam jangka waktu tertentu dalam kaitannya dengan pilihan lain, termasuk standar kinerja kerja, target atau tujuan, atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan bersama-sama. (Y. H. Putri & Utara, 2021). Oleh karena itu, efektivitas organisasi publik yang seringkali tinggi akan sangat krusial bagi pelaksanaan pembangunan daerah dan inisiatif pemerintah. Untuk meningkatkan mutu layanan publik, penting bagi badan publik untuk melakukan evaluasi kinerja. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengevaluasi seberapa baik organisasi publik melayani masyarakat karena organisasi publik pada hakikatnya berfokus pada pelayanan (*service public minded*) dan bukan berorientasi pada keuntungan (*profit seeking*). Selain penilaian kinerja terdapat evaluasi kinerja yang berupaya memberi inspirasi kepada pekerja untuk memenuhi tujuan organisasi untuk mematuhi norma perilaku yang ditetapkan

sebelumnya guna menghasilkan perilaku serta hasil yang diharapkan (Pandaleke., 2021).

Konsep yang menjadi pedoman tata cara dan metode pengelolaan perusahaan yang berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan dan etika bisnis dikenal dengan istilah *good corporate governance*, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012. Menurut Indeks Tata Kelola Indonesia, dampak *good governance* terhadap mutu penyelenggaraan pelayanan publik adalah tata kelola yang baik berdampak pada mutu penyediaan layanan publik. Tata kelola adalah proses pembuatan dan penegakan hukum, peraturan, dan prioritas pembangunan melalui interaksi antara legislatif dan eksekutif serta melalui birokrasi dengan keterlibatan dari komunitas organisasi dan masyarakat sipil. Sebagaimana dapat dilihat dari pengertian Akuntabilitas sangat penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas sangat terkait dengan tanggung jawab atas keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan program dan kebijakan. Salah satu perangkat terpenting untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam manajemen organisasi publik adalah akuntansi kinerja. "Akuntabilitas publik merupakan perwujudan dari suatu lembaga agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan target secara berkala," menurut Maria Ersalina Meme (2019). Akuntabilitas berarti bahwa semua tindakan harus dilaporkan kepada pemangku kepentingan, atau pihak yang berkepentingan. (Mardiasmo, 2018). Hal ini dapat berupa menyediakan, menyajikan, dan melaporkan tindakan kepada pimpinan melalui

laporan keuangan adalah beberapa cara untuk melakukannya. Konsep akuntabilitas telah diperluas untuk mencakup manajemen keuangan terpadu dan tata kelola pemanfaatan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya secara efisien dan berhasil di semua tingkat pemerintahan. Akibatnya, salah satu aspek akuntabilitas adalah persyaratan untuk melaporkan dan menunjukkan semua tindakan administratif dan tindak lanjut kepada pihak yang lebih tinggi. Organisasi sektor publik harus berpegang pada empat aspek akuntabilitas, menurut Mardiasmo (2018): (1) akuntabilitas integritas dan legalitas; (2) akuntabilitas proses; (3) akuntabilitas program; dan (4) akuntabilitas kebijakan. Menerapkan keempat elemen ini akan memungkinkan akuntabilitas publik berfungsi sebaik-baiknya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, transparansi didefinisikan sebagai pengungkapan informasi keuangan secara terbuka dan publik, yang didasarkan pada hak masyarakat untuk mengetahuinya dan keseluruhan pelaksanaan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya material. Tujuan transparansi, menurut Toni Nurhadianto dkk. (2019), adalah agar masyarakat dapat mengakses informasi yang cukup dan transparan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*). Namun, transparansi juga berfungsi sebagai alat untuk mengelola kinerja pemerintahan. Komponen terpenting dari penyelenggaraan pemerintah dalam memenuhi amanat rakyat adalah transparansi.

Dengan penekanan lebih besar pada upaya preventif dan promotif, Pusat Kesehatan Masyarakat, disebut juga Puskesmas, merupakan sarana pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, baik kesehatan masyarakat maupun kesehatan individu, dalam upaya mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah pelayanannya. (Jelly Juliany Mentang, 2018). Layanan langsung yang diberikan dimaksudkan untuk meningkatkan dan memperkuat manajemen layanan kesehatan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian, serta kualitas, cakupan, dan efektivitas pelaksanaan rujukan medis dan kesehatan terpadu. Agar dapat terus berkembang, pusat kesehatan harus secara strategis meningkatkan layanan mereka sebagai respons terhadap kebutuhan dan permintaan masyarakat. Karena efektivitas organisasi publik memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat, upaya untuk meningkatkan kinerja mereka terutama pusat kesehatan harus transparan dan akuntabel. Fenomena di lapangan dalam hal ini Puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terdapat beberapa Puskesmas yang belum menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraannya. Untuk lebih memahami dampak akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja organisasi publik, khususnya di sektor kesehatan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja Puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta instansi pelayanan kesehatan lainnya dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti mengembangkan rumusan masalah sebagai berikut berdasarkan latar belakang di atas:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Puskesmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja Puskesmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?
3. Apakah akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja Puskesmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan definisi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap Puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap Puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja Puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja Puskesmas di Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

2. Manfaat Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau sebagai data pembanding dengan bidang yang akan diteliti, memberikan ide, menambah ilmu pengetahuan dan memberikan bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Kegunaan Bagi Institusi

Sebagai informasi bagi pimpinan dan pegawai Puskesmas di Kabupaten Pangkajene Kepulauan di era reformasi, khususnya mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi kinerja organisasi publik.

2. Kegunaan Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana seorang pimpinan dan pegawai mengelola akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja suatu organisasi publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritik

2.1.1 *Stakeholder Theory*

Menurut perspektif bisnis, pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah sekumpulan koneksi antara organisasi yang berkepentingan dengan operasi yang membentuk suatu perusahaan. Pelanggan, pemasok, pekerja, investor (bank, pemegang obligasi, pemegang saham, dll.), masyarakat, dan manajemen semuanya terlibat dalam koneksi ini untuk bersama-sama menghasilkan dan bertukar nilai. Menggunakan frasa tersebut dengan cara tertentu akan sangat membantu untuk beberapa tujuan.

Teori pemangku kepentingan (*stakeholder*) didasarkan pada konsep bahwa selain pemegang saham, ada beberapa orang yang berkepentingan dengan perilaku dan pengambilan keputusan perusahaan. Gagasan populer yang menjadi dasar studi tentang pelaporan keberlanjutan adalah teori pemangku kepentingan. Menurut *stakeholder theory*, bisnis lebih banyak berutang kepada kelompok kepentingan daripada kepada pemegang saham. *Stakeholder* adalah orang atau organisasi yang memiliki dampak dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan. Karyawan, klien, pemasok, kreditor, masyarakat umum, dan bisnis pesaing semuanya dianggap sebagai pemangku kepentingan. Tidak semua pemangku kepentingan adalah pemegang saham. (Ganiem & Kurnia, 2019).

Tujuan utama teori pemangku kepentingan adalah untuk membantu manajer perusahaan dalam menavigasi interaksi dalam perusahaan mereka dan lebih memahami lingkungan pemangku kepentingan mereka. Teori pemangku kepentingan adalah kumpulan aturan dan praktik yang berkaitan dengan pemangku kepentingan, nilai-nilai, kepatuhan hukum, penghormatan terhadap lingkungan dan masyarakat, dan komitmen komunitas bisnis untuk memajukan pembangunan berkelanjutan. (Wati, 2019). Dengan penjelasan teori pemangku kepentingan, organisasi tidak hanya peduli terhadap kepentingan mereka sendiri, tetapi juga memberikan keuntungan bagi pemangku kepentingan.

Menurut teori pemangku kepentingan, pemangku kepentingan harus mendukung perusahaan agar perusahaan dapat bertahan, oleh karena itu pengakuan pemangku kepentingan diperhitungkan dalam operasi bisnis. Semakin berpengaruh pemangku kepentingan, semakin besar pula penyesuaian yang harus dilakukan oleh perusahaan. Setelah itu, pengungkapan sosial dan lingkungan dipandang sebagai dialog antara perusahaan dan pemangku kepentingannya. Perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* karena alasan berikut: 1) Masalah lingkungan memengaruhi kepentingan setiap kelompok sosial dan berpotensi menurunkan standar hidup mereka. 2) Produk yang diangkut melalui perdagangan memberi nilai tinggi pada lingkungan di era globalisasi. 3) Perusahaan dengan kebijakan dan tujuan lingkungan lebih mungkin dipilih oleh investor investasi. 4) Pemerhati lingkungan dan LSM semakin bersedia mengkritik bisnis yang acuh tak acuh.

2.1.2 Akuntabilitas

Mahmudi (2019) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai pengabdian pemerintah dalam mengelola sumber daya publik dan menginformasikan kepada publik tentang semua tindakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatannya. Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2018) merupakan kewajiban pemberi amanat (agen) untuk mempertanggungjawabkan keterangan dengan cara menyampaikan, melaporkan, dan mengkomunikasikan segala tindakan dan kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan prinsip, yang mempunyai kemampuan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban pihak lain atas tindakan dan kegiatan tersebut. Dalam konteks lembaga pemerintah, akuntabilitas publik mengacu pada penyebaran informasi dan transparansi operasi pemerintah dan hasil keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Untuk memenuhi hak publik, pemerintah pusat dan daerah harus diizinkan menjadi subjek penyedia informasi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanah untuk mengelola, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya publik yang ditugaskan kepada masyarakat dikatakan bertanggung jawab.

2.1.2.1 Dimensi Akuntabilitas Publik

Berikut ini adalah dimensi-dimensi akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2018):

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran: Akuntabilitas hukum berkaitan dengan upaya memastikan bahwa undang-undang dan peraturan lain yang mengatur

penggunaan dana publik dipatuhi, sedangkan akuntabilitas jujur berkaitan dengan upaya mencegah penyalahgunaan wewenang.

2. Akuntabilitas proses adalah hubungan antara metode yang digunakan untuk menyelesaikan tugas dan kecukupan metode tersebut dalam hal sistem informasi administrasi, manajemen, dan akuntansi.
3. Akuntabilitas program adalah cara berpikir tentang apakah tujuan dapat dicapai atau tidak dan apakah program lain yang menawarkan hasil terbaik dengan biaya serendah mungkin telah dipertimbangkan atau tidak.
4. Akuntabilitas kebijakan: Akuntabilitas ini mengacu pada tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah atas kebijakan yang mereka terapkan untuk DPR/DPRD dan masyarakat.

2.1.2.2 Jenis-jenis Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2018) membedakan dua kategori pertanggungjawaban publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (Internal): Akuntabilitas ini merujuk pada pelaporan pengelolaan keuangan kepada otoritas yang lebih tinggi. Unit kerja (lembaga), misalnya, bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, yang selanjutnya bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, yang bertanggung jawab kepada DPR. Setiap pejabat publik, baik individu maupun kelompok, secara progresif melaporkan kepada atasannya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan tugas secara terorganisasi, atau jika diperlukan.
2. Akuntabilitas kepada masyarakat luas dikenal sebagai akuntabilitas horizontal (eksternal). Agar masyarakat mengetahui, semua lembaga negara—baik

pemerintah pusat maupun daerah harus mempertanggungjawabkan semua arahan yang diterima dan dijalankan.

2.1.2.3 Tahapan-Tahapan Akuntabilitas Publik

Halim (2015) menegaskan bahwa terdapat beberapa tahapan akuntabilitas publik, antara lain:

1. Agar dapat mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan publik, maka pelaporan merupakan salah satu syarat yang harus dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah mengelola sumber daya publik menjadi tanggung jawab masyarakat melalui penelusuran informasi atau investigasi.
3. Penilaian atau Verifikasi Masyarakat bertanggung jawab untuk menilai sejauh mana pemerintah mengawasi penggunaan sumber daya publik.
4. Evaluasi atau Konfirmasi Masyarakat bertugas mengevaluasi seberapa baik pemerintah mengelola sumber daya publik.
5. Pengarahan dan Pengendalian Masyarakatlah yang menentukan seberapa baik pemerintah mengawasi penggunaan sumber daya publik.

2.1.2.4 Indikator Akuntabilitas Publik

Beberapa indikator akuntabilitas publik disebutkan oleh Mardiasmo (2018), antara lain:

1. Kejujuran dengan menghindari kewenangan.

2. Metode penilaian kesesuaian sistem informasi akuntansi guna menentukan apakah strategi kerja sudah memadai.
3. Pertimbangan mengenai program, seperti apakah tujuan tersebut dapat tercapai dan apakah program lain yang menawarkan hasil terbaik dengan biaya serendah mungkin telah diperhitungkan.
4. Berkaitan dengan kebijakan akuntabilitas pemerintah pusat dan daerah.

Mahmudi (2019) mencantumkan sejumlah metrik akuntabilitas publik, termasuk:

1. Kejujuran dan tanggung jawab hukum
 - a. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
 - b. Menghindari korupsi dan kerjasama
2. Akuntabilitas proses
 - a. Mengikuti protokol
 - b. Menyediakan layanan masyarakat yang reseptif
 - c. Menyediakan layanan masyarakat yang akurat
 - d. Menyediakan layanan masyarakat yang terjangkau
3. Akuntabilitas program
 - a. Program lain yang menghasilkan hasil terbaik
 - b. Tanggung jawab atas kebijakan yang ditetapkan
4. Akuntabilitas kebijakan
 - a. Tanggung jawab atas kebijakan
 - b. Tanggung jawab atas kebijakan yang dilaksanakan
 - c. Mempertimbangkan dampak potensial

2.1.3 Transparansi

Setiap organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat harus menyediakan informasi kepada publik agar mereka dapat mengawasi organisasi tersebut. Kebebasan pers dan terciptanya masyarakat informasi yang memiliki kekuatan untuk mengawasi operasi pemerintahan merupakan tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-Undang ini mewajibkan masyarakat untuk dapat mengajukan atau memanfaatkan informasi publik atas berbagai hal yang berkaitan dengan keterbukaan informasi, khususnya yang berkaitan dengan atau berada di bawah kewenangan badan publik.

Ketika berbicara tentang pengelolaan keuangan organisasi nirlaba, transparansi menjadi topik penting untuk dibahas. Dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan komponen-komponen yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, transparansi adalah penyajian laporan kepada semua pihak secara terbuka dan jujur (Kabib, 2021). Lebih lanjut, transparansi merupakan salah satu gagasan tata kelola pemerintahan yang baik, yang didefinisikan sebagai asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnyanya terkait pengelolaan keuangan daerah (Firmansyah & Nuryani, 2020). Dengan demikian, transparansi mengandung makna bahwa seluruh kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan dapat diakses dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Lebih lanjut, transparansi juga dipandang sebagai suatu kebijakan yang menjamin setiap orang dapat secara bebas mengakses informasi tentang bagaimana program

dilaksanakan, khususnya rincian tentang kebijakan, bagaimana kebijakan dibuat dan dilaksanakan, serta hasil yang dicapai.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan hak masyarakat untuk mengetahui secara lengkap dan terbuka tentang akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap hukum.

Transparansi adalah pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dapat diakses publik, dimulai dengan proses pembuatan kebijakan dan berlanjut melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian yang tersedia bagi pihak mana pun yang membutuhkan informasi. Definisi lain dari transparansi adalah kesediaan organisasi untuk terbuka kepada para pemangku kepentingan tentang operasi pengelolaan sumber daya publiknya. Informasi gratis adalah dasar dari transparansi. Semua lembaga, proses, dan informasi pemerintah harus dapat diakses oleh para pemangku kepentingan, dan informasi tersebut harus memadai untuk dipahami dan dipantau. Transparansi adalah ketersediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu mengenai kebijakan publik dan proses perumusannya. Agar masyarakat dapat terlibat dalam pengelolaan daerah, informasi merupakan kebutuhan yang sangat penting. Dengan adanya informasi, masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan untuk menjamin bahwa hasil terbaik bagi masyarakat tercapai melalui kebijakan publik dan menghindari penipuan serta manipulasi yang secara tidak adil menguntungkan beberapa pihak

terpilih. Sebagai sarana komunikasi publik, media juga sama pentingnya. Pemerintah harus melakukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan pengawasan dan menyediakan informasi tentang tindakan publik yang tersedia bagi publik sebagai bagian dari komunikasi publik ini.

2.1.4 Kinerja Organisasi

Organisasi yang membantu masyarakat di semua tingkatan, dari yang terendah hingga yang tertinggi, dikenal sebagai organisasi pemerintah. Banyak harapan masyarakat terhadap peningkatan layanan pemerintah dapat terpenuhi secara wajar di era pertumbuhan saat ini. Tentu saja, peningkatan kinerja pejabat pemerintah diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Masyarakat akan menerima layanan yang lebih baik jika karyawan berkinerja lebih baik.

Secara etimologi, Kata "kerja" merupakan sumber dari kata "kinerja". Kinerja suatu organisasi menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai atau tidak. Dimana pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi yaitu kinerja organisasi dan kinerja pegawai. Kinerja merupakan suatu pencapaian hasil atau derajat pencapaian dimana kinerja organisasi dapat dilihat dari tingkat sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Wahyudi, 2022).

Ketika individu atau komponen organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi, kinerja adalah hasil akhirnya. Sederhananya, kinerja adalah hasil dari tindakan administratif, yaitu kolaborasi di dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan yang administrasinya disebut sebagai manajemen. Kinerja adalah tingkat di mana suatu kegiatan, program, atau

kebijakan diimplementasikan untuk mencapai tujuan, visi, target, dan sasaran organisasi sebagaimana yang diuraikan dalam perencanaan strategisnya. Hal ini berlaku untuk perusahaan dan organisasi sektor publik.

Kinerja karyawan menurut Adhari (2020) merupakan hasil dari suatu fungsi atau kegiatan pekerjaan tertentu dalam suatu pekerjaan tertentu dalam kurun waktu tertentu yang menunjukkan mutu dan volume pekerjaan. Kinerja karyawan menurut Rerung (2019) adalah perilaku yang dihasilkan selama pelaksanaan tugas yang dapat diamati dan diukur serta merupakan kontribusi seseorang terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Kinerja merupakan hasil fungsi pekerjaan atau tindakan individu di dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor guna mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu tertentu, menurut Sinaga (2020). Menurut berbagai definisi kinerja yang diberikan di atas, kinerja adalah hasil kerja yang dilakukan oleh individu dan kelompok organisasi untuk membuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung organisasi dalam mencapai visi, misi, target, dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengelolaan suatu korporasi tentu memerlukan sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Peralatan, uang, tenaga, dan sumber daya manusia (SDM) merupakan contoh sumber daya fisik, sedangkan sumber daya nonfisik meliputi peraturan, data, dan kebijakan. Dengan demikian, sumber daya tersebut juga memiliki dampak terhadap kinerja organisasi. Baik organisasi publik maupun organisasi komersial sama-sama bertanggung jawab terhadap kinerja organisasi. Suatu organisasi publik dianggap berkinerja baik apabila layanan yang diberikan kepada masyarakat terpenuhi dan tersusun dengan baik sesuai dengan SOP.

Kemudian, dengan menggunakan indikator kinerja, pengukuran kinerja dapat dilakukan untuk mengetahui apakah organisasi publik telah memenuhi tanggung jawabnya dan apakah tujuannya telah tercapai, khususnya dalam hal memberikan layanan kepada masyarakat.

Evaluasi kinerja organisasi merupakan komponen yang krusial. Hal ini dikarenakan kinerja dan evaluasi kinerja tidak dapat dipisahkan. Indikator-indikator berikut tersedia untuk digunakan dalam penerapan pengukuran kinerja organisasi :

1. *Input*: segala sesuatu yang diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan kegiatan menghasilkan output, yang dapat mencakup uang, informasi mengenai kebijakan atau peraturan, sumber daya manusia, dan sebagainya.
2. *Proses*: setiap langkah yang diambil untuk mengubah masukan menjadi keluaran..
3. *Output*: segala sesuatu yang diharapkan akan digunakan segera setelah suatu tindakan, termasuk konsekuensi yang nyata maupun tidak nyata. Fungsi output kegiatan atau hasil aktual dari suatu kegiatan yang diciptakan disebut dengan *outcome*.
4. *Manfaat*: semua tujuan akhir pelaksanaan kegiatan, yaitu merangkum keuntungan yang diperoleh dari indikator hasil dan diharapkan dapat dicapai semaksimal mungkin.
5. *Dampak*: efek yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan yang ditimbulkan oleh outcome kegiatan tak perlu dikatakan lagi bahwa pengaruh ini terlihat dalam jangka menengah atau panjang. Sementara itu, keberhasilan

suatu organisasi publik juga sangat dipengaruhi oleh kinerja aparatur publiknya.

Karena kualitas sumber daya manusia suatu organisasi merupakan faktor utama yang menentukan keberlanjutan dan kemajuannya, organisasi publik senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pegawai dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini karena sumber daya memungkinkan organisasi untuk melaksanakan semua kegiatan dan mengelola sumber daya yang ada seefisien mungkin.

2.2 Tinjauan Empirik

Berikut penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Devi Irma Sucia Ningtyas dan Retno Murni Sari (2019)	Analisis Kinerja Pelayanan Publik Puskesmas terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar)	Berdasarkan hasil penelitian, kinerja pelayanan di UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah berjalan dengan baik. Namun, untuk mempertahankan nilai indeks kepuasan masyarakat dan terus meningkat, kinerja pelayanan	Sama- sama meneliti terkait kinerja pelayanan yang ada di Puskesmas.	Penelitian ini menggunakan dua variabel, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 3 variabel

			harus dilaksanakan sesuai dengan standar dan prinsip pelayanan publik yang berlaku.		
2	Ayu Mulkhadimah (2022)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Puskesmas Saat Pandemi COVID-19 (Studi Empiris pada Puskesmas se-Kota Pekanbaru).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik di puskesmas.	Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pelayanan publik.	Pada penelitian ini menggunakan 5 variabel sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan 3 variabel
3	Sandra Putri Kurniawati (2016)	Analisis Pengaruh Persepsi Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Terhadap	Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik dipengaruhi secara positif oleh rasa akuntabilitas dan transparansi..	Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja	Objek dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan

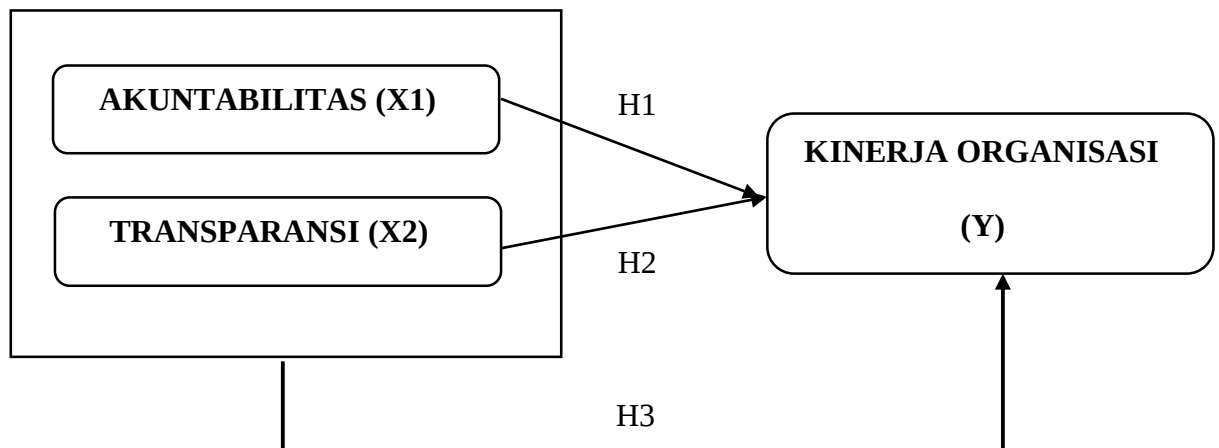
		Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Jember		pelayanan publik	langsung sedangkan, penelitian objek pada penelitian sekarang adalah Organisasi Publiknya.
--	--	--	--	---------------------	--

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan dan menggambarkan hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya, atau antara satu variabel dengan variabel lain dari masalah yang akan diteliti, menurut Notoatmodjo (2018). “Pengaruh Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan” menjadi fokus teori utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan variabel independen (X1) yaitu “Akuntabilitas” dan “Transparansi”, sedangkan variabel dependen (Y) yaitu “Kinerja Organisasi”.

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, kerangka konseptual ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dibahas secara lebih rinci.

Berdasarkan uraian tersebut kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan solusi jangka pendek terhadap permasalahan penelitian yang dibahas. Hipotesis harus dapat diuji, artinya variabel yang disebutkan harus dapat diukur dan data pengukuran harus dapat diuji untuk menunjukkan kebenarannya (Nursalam, 2020).

Peneliti akan melakukan pengujian lebih lanjut dengan melakukan uji hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas (X1) yaitu “Akuntabilitas” dengan variabel terikat (Y) yaitu “Kinerja Organisasi” dan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas (X2) yaitu “Transparansi” dengan variabel terikat (Y) yaitu “Kinerja Organisasi”.

Oleh karena itu, berikut ini adalah hipotesis yang mungkin dibuat tentang masalah ini:

- H₁ : Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- H₂ : Transparansi berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja di Puskesmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- H₃ : Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja Puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Temuan peneliti berdasarkan data dan analisis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi di Puskesmas Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik di puskesmas.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi Puskesmas Kabupaten Pangkajene Kepulauan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel transparansi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dengan menyediakan informasi yang memadai dan mudah dipahami serta menggunakannya sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi hasil kinerja dalam organisasi. Aksesibilitas informasi sangat penting untuk menjamin akuntabilitas pemerintah.
3. Temuan penelitian menunjukkan bahwa di Puskesmas Kabupaten Pangkajene Kepulauan, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja organisasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu yang menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap

kinerja satuan perangkat daerah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori stakeholder yang menjelaskan bahwa teori ini merupakan kumpulan kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan stakeholder, nilai-nilai, dan pemenuhan ketentuan hukum. Dengan adanya teori stakeholder ini maka organisasi tidak hanya peduli terhadap kepentingannya sendiri, tetapi juga memberikan manfaat kepada stakeholder.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyebaran kuesioner dengan mendatangi Puskesmas di Kabupaten Pangkajene Kepulauan cukup lama.
2. Proses pengumpulan kuesioner membutuhkan waktu yang cukup lama karena jarak antar Puskesmas yang cukup jauh.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pimpinan Puskesmas Kabupaten Pangkajene Kepulauan hendaknya menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi yang telah dibangun dan bahkan ditingkatkan agar kinerja Puskesmas semakin baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan perbaikan pada area penelitian dan membuat variabel independen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, L. Z. (2020). *Optimalisasi Kinerja Karyawan Menggunakan Pendekatan Knowledge Management & Motivasi Kerja*. Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media.
- Afif, M. (2019). Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Packing Produk Minuman PT. Singa Mas Pandaan. *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Inovasi Bisnis Vol. 1 (2)*, 107-108.
- Amin, M. (2018). Kedudukan Akal Dalam Islam. *Tabawu Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol 3 (1)*.
- Aswadi. (2014). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang)*, Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Devi Irma Sucia Ningtyas, R. M. (2019). Analisis Pelayanan Publik Puskesmas terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus UPTD Kesehatan Kepanjenkidul Kota Blitar. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 123-134.
- Devi Satria Saputra, D. S. (2014). Pengaruh Transparansi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada Pemda Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol 3 (2)*, 1-8.
- Elkha F, W. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 9 (3)*, 1-19.
- Firmansyah, N. (2020). Determinants of Transparency in Financial Management on Local. *Humanities and Social Sciences Letters, Vol. 8(2)*, 145-155.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim. (2015). *Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan) Jilid 1 Edisi 5*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Jelly Juliany Mentang, A. A. (2018). Hubungan Antara Kualitas Jasa Pelayanan Kesehatan Dengan Kepuasan Pasien di Puskesmas Taratara Kota Tomohon. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Vol 7 (5)*, 1-7.

- Kabib, N. U. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 7 (1)*, 341-349.
- Kurniawati, S. P. (2016). Analisis Pengaruh Persepsi Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Jember. *Digital Repository Universitas Jember*, 13-18.
- Leila Mona Ganiem, E. K. (2019). *Komunikasi Korporat Konteks Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Maria Ersalina Meme, A. S. (2019). Pengaruh Pengawasan Fungsional, Transparansi, Akuntabilitas, dan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 8 (10)*, 1-19.
- Mikael Edowati, e. a. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiya. *Indonesian Journal of Business and Management, Vol. 4(1)*.
- Mulkhadima, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Puskesmas Saat Pandemi COVID-19 (Studi Empiris pada Puskesmas se-Kota Pekanbaru). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 (3)* , 1-12.
- Nasution. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 (3)*, 149-262.
- Notoatmodjo. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, D. F. (2020). Fenomena Badut : Sebuah Kajian Stakeholder Theory. *JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan)*.
- Nursalam. (2020). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis*. Salemba Medika.
- Onita Sari Sinaga, e. a. (2020). *Manajemen Kinerja dalam Organisasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Pratiwi, L. (2021). Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan UD Adli di Desa Kukajadi Kecamatan Perbaungan. *Jurnal Bisnis Mahasiswa* .

- Putri, Y. H. (2021). Market Value Added Sebagai Alat Pengukur Kinerja Perusahaan dan Harga Saham. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Vol. 4 (1)*, 325.
- Rerung, R. R. (2019). *Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Employee Engagement Dan Organizational Citizenship Behavior*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Reska Brigita Pandaleke, J. j. (2021). Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Pengukuran Kinerja Pada PT. Bank Sultgo Cabang Ratahan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen Bisnis, dan Akuntansi Vol. 9 (3)*, 1020.
- Salihi, I. R. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan. *Juremi : Jurnal Riset Ekonomi Vol 2 (6)*, 771-772.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Toni Nurhadiano, N. K. (2019). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *Technobiz International Journal Business Vol. 2 (2)*, 25-30.
- Uma Sekaran, R. B. (2022). *Metedologi Penelitian Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian Edisi 6 Buku 1 dan 2*. Jakarta: Salemba 4.
- Wahyudi, D. M. (2022). Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Dan Fasilitas Kantor Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Kampar. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, Vol. 5(1), 887-898.
- Wati, L. N. (2019). *Model Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jawa Timur: Myria Publisher.
- Yudi Prasetyo, S. H. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 12 (2)*, 106.
- Yulianti, M. T. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 23 (20)*, 3466-3470.